



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARI SAPTO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **855100**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **5.130.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 601 m2/115 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/100 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 1427 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **327.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G DSL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 138.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, HONDA AC82J22803.A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **335.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.792.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.792.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.